

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Agustina, S., dkk., *Penjelasan Hukum: Sifat Melawan Hukum Dalam Kasus Korupsi*, LeIP, Jakarta, 2016.
- Chandra, T. Y., *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022.
- Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Damera Press, Jakarta, 2022.
- Ilyas A., *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Mahfud, M. A., *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Yoga Pratama, Semarang, 2024.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Nugroho, S. S., dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020.
- Pangaribuan, P., dan Purnomosidi, A., *Negara Hukum Pancasila Dalam Kerangka NKRI*, Cakrawala Media, Surakarta, 2012.
- Purwoleksono, D. E., *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016.
- Rahaditya, R., *Hukum Acara Pidana*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2024.
- Rahmad, R. A., *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Sibuea, H. P., *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Krakatau Book, Jakarta, 2006.
- Solikin, N., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, 2021.
- Sulastri, L., *Hukum Acara Pidana*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2024.
- Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Juwara, Sidoarjo, 2018.
- Widiarty, W. S., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn Jkt.Pst.

Jurnal Ilmiah

- Afdhali, D. R., dan Syahuri, T., Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Afrizal, M., Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sekayu), *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Alfons, R., dkk., Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Tindakan Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Di Lakukan Oleh Anak, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 4, 2024.
- Anugrah, R., Kebijakan Formulasi Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Equitable*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Apriani, T., Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana, *Ganec Swara*, Vol. 13, No. 1, 2019.

- Ar, A. M., Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia, *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3, 2024.
- Ardiansyah, H., dkk., Analisis Yuridis Unsur Pemberat Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurisdictie*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Ashari, A., Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana, *Al-Hikam*, Vol. 1, No. 3, 2017.
- Asshofa, M. M., dkk., Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana, *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Benuf, K., dan Azhar, M., Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Dalimunthe, I. F., dkk., Desain Penuntutan Hukum Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Darmansyah, E., dan Silalahi, W., Tinjauan Yuridis Terhadap Reformasi Hukum Acara Penyidikan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 7, 2025.
- Djenaung, A. G., dkk., Kajian Hukum Terhadap Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Sebagai Suatu Tindak Pidana, *Lex Administratum*, Vol. 12, No. 5, 2024.
- Edward, R. F., dan Wiraguna, S. A., Problematika Pembacaan Keterangan Saksi oleh Penyidik dalam Perspektif Hukum Acara Mahkamah Agung, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 6, 2025.
- Endratno, C., Refleksi Filsafat Hukum: Telaah Sintesa Keadilan, *Yustitiabelen*, Vol. 8, No.2, 2022.
- Harahap, S. A., dkk., Pemerksaan Pada Anak, *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 2, No. 4, 2021.
- Hasibuan, J. B., Kedudukan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Journal of Law*, Vol. 6, No. 1, 2019.
- Hasoloan, R. J., dkk., The Spirit of the Anti-Corruption Movement in the Campus Environment Through Various Community Creativity Social Media Movements, *Journal of Creativity Student*, Vol. 7, No. 1, 2022.
- Holle, M. S. B., dkk., Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan, *Syntax Literate*, Vol. 10, No. 4, 2025.
- Isnain, A. A., Teori Hukum Tentang Kerugian Negara yang Nyata dan Pasti, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023.

- Kaparang, X. C. E. D., dkk., Sanksi Hukum Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 13, 2021.
- Karisa, I. A., Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014/PN. Kln), *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 1, 2020.
- Karunia, A. A., Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10, No. 1, 2022.
- Kenneth, N., Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun, *JLEB: Journal of Law Education and Business*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Korua, R. V., Kajian Hukum Putusan Bebas (*Vrijsppraak*) Dalam Perkara Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 9 No. 4, 2020.
- Lokas, R. Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Lex et Societatis*, Vol. 3, No. 9, 2015.
- Lubis, A. H., dan Hasbi, M., Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 12, 2024.
- Luhfitasari, R., Upaya Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Yang Belum Di Atur Dalam Undang-Undang Nasional, *Jurnal de Jure*, Vol. 11, No. 2, 2019.
- Luis, Legalitas Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Pada Putusan Pengadilan, *Jurnal Hukum Adigana*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Maggalatung, A. S., Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2014.
- Mappatunru, A. M. D., Unsur Memperkaya Dan Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2021.
- Marbun, R., dan Ariani, M., Melacak Mens Rea Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik Dalam Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Maroni, M., dkk., Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No.4, 2020.

- Marpaung, B., Memahami Pemenuhan Unsur Perbuatan Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Masrita, W. E. S., dkk., Kedudukan Keterangan Saksi Dalam Pembuatan Putusan Pidana Berkaitan Dengan Pasal 169 KUHAP (Studi Putusan Nomor: 575/Pid.B/2020/PN Cbi), *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 8, No. 1, 2024.
- Maulana, M. A., dan Aristi, A., Analisis Penentuan Dolus dan Culpam dalam Penyebaran Hoax Melalui Digital, *Jurnal Multidisiplin West Science*, Vol. 03, No. 10, 2024.
- Maulidya, G. Z., dkk., Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia, *HUKMY : Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2023.
- Mawey, A. G., Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, *Lex Crimen*, Vol. V, No. 2, 2016.
- Melati, D. P., dan Setiadi, B., Efektivitas Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Menjamin Keadilan Bagi Terdakwa dan Korban, *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2025.
- Moho, H., Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Dharmawangsa*, Vol. 13, No. 1, 2019.
- Monteiro, J. M., Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 25, No. 2, 2007.
- Nur, A., dkk., Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 7, 2021.
- Nuraini dan Ansori, M., Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Wajah Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Nurhafifah dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 66, 2015.
- Pawewang, R. R., dkk., Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP, *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 4, 2021.
- Pradika, D. H., dkk., Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No. 2, 2022.

- Purwanto, Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Putra, F. H. Y., dkk., Analisa Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Ancaman Dalam Putusan Nomor 749/K/Pid/2013, *Jurnal Judiciary*, Vol. 10, No. 1, 2021.
- Rahmawati, D., dkk., Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Riyanto, A., Tinjauan Yuridis Fungsi Surat Dakwaan Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Di Pengadilan, *Jurnal PETITA*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Sabigin, C. D. M., Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Publik Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Konstituen*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Salsadila, N., dkk., Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Sari, I., Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1, 2020.
- Sembiring, R., Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles, *Aktual Justice*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Septiany, W., dan Septianita, H., Akibat Hukum Onvoldoende Gemotiveerd Dalam Putusan Anak Berdasarkan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Kwg), *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Siallagan, H., Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia, *Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 2, 2016.
- Siregar, L. R., dan Siregar, H., Analisis Yuridis Terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Di Kejaksaan Negeri Medan (Studi Putusan Nomor 447/Pid.B/2025/Pn.Mdn), *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 9, No. 10, 2025.
- Siregar, R. A., dkk., Pengakuan Terdakwa dalam Proses Persidangan sebagai Alat Bukti, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 4, 2024.
- Sitohang, H., dkk., Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalagunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuapan Aktif (Studi Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/Tpk/2017/Pn Sby), *Patik : Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2018.

- Sowikromo, A. R. D., Pemerasan Oleh Pegawai Negeri Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, *Lex Privatum*, Vol. 5, No. 8, 2017.
- Sriwijayanti, A. S., dkk., Konsep dan Komitmen Pemberantasan Korupsi, *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 2, 2022.
- Sudaryanto, A., Tugas Dan Peran Hakim Dalam Melakukan Penemuan Hukum/Rechtvinding (I.C Penafsiran Konstitusi Sebagai Metode Penemuan Hukum), *Jurnal Konstitusi*, Vol. I, No. 1, 2012.
- Sumampow, J. O., Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 3, 2013.
- Sungkar, A. A. R., Pembuktian dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum dalam Perkara Turut Serta Menimbulkan Kebakaran Bagi Barang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 24/Pid.B/2016/PN.Kln), *Jurnal Verstek*, Vol. 7, No. 2, 2019.
- Supraptiningsih, U., Peradilan Satu Atap Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 2, 2007.
- Susi, E., Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHP, *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 3, 2019.
- Susilo, E., Kajian Tujuan dan Asas Hukum Acara Pidana: Pilar Utama Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Thengkyang*, Vol. 9, No. 1, 2024.
- Syauki, A., dkk., Corruption: Not A Taboo For Indonesians? *Indonesian Journal of Accounting and Business*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Syukur, K. A., Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 3, No. 2, 2015.
- Tama, I. M., Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, *Jurnal Madani Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Toloh, P. W. Y., Konflik Kepentingan Dan Mekanisme Penanganannya Dalam Pengelolaan Keuangan Negara, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 10, No. 1, 2024.
- Ulya, Z., Dilematisasi Kelembagaan Antar Lembaga Kekuasaan Yudikatif Guna Mencapai Harmonisasi Hukum, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 3, 2021.
- Wahid, K., Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Edaran Jaksa Agung Tentang Pedoman Tuntutan Dikaitkan Dengan Asas Legalitas Dan Asas

Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 8, No. 2, 2021.

William, C., dan Wijaya, T. D., Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka, *Dinamika Hukum & Masyarakat*, Vol. 6, No. 1, 2023.

Yuningsih, D., dkk., Keadilan Hukum Terhadap Eksekusi Putusan Pidana Menyangkut Barang Bukti Yang Terikat Perjanjian Sewa Pembiayaan, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 6, No. 2, 2024.

Yusak, F. A., dan Satria, H., Menalar Putusan Surat Dakwaan Yang Batal Demi Hukum Dalam Delik Perzinaan, *Jurnal Yudisial*, Vol. 17, No. 2, 2024.

Laporan Penelitian, Skripsi, Skripsi, Disertasi

Putra, W. M. H., Analisis Yuridis Tindak Pidana Cyber Terrorism Dalam Hukum Pidana Di Indonesia, *Skripsi*, Universitas Brawijaya, 2016.

Media Online

Nusantara, A. W., Analisis Hukum terhadap Tuduhan Korupsi Impor Gula pada Kasus Tom Lembong: Politisasi atau Penegakan Hukum?, <https://lk2fhui.Law.Ui.Ac.Id/Portfolio/Analisis-Hukum-Terhadap-Tuduhan-Korupsi-Impor-Gula-Pada-Kasus-Tom-Lembong-Politisasi-Atau-Penegakan-Hukum/>, Diakses pada 26 Agustus 2025, pukul 23:42.

Prasetyo, A., 4 Juli 2025, Tom Lembong Dituntut 7 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tom-lembong-dituntut-7-tahun-penjara-dalam-kasus-dugaan-korupsi-impor-gula-lt6867bf59da098/?page=2>, Diakses pada 28 Agustus 2025 pukul 21:07.

Pusat Edukasi Antikorupsi, 24 Desember 2021, Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 20 November 2025.